

PERAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KOTA SAMARINDA

Linda Saputri¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Samarinda. Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan gambaran keadaan yang terjadi dilapangan.

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Komisi Penanggulangan AIDS Kota Samarinda. Dimana yang menjadi Key Informant dalam penelitian ini adalah Pengelola Program Monitoring KPA Kota Samarinda, staf-staf sekretariat KPA Kota Samarinda dan pihak-pihak LSM yang terlibat dalam kerjasama pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta pihak-pihak yang berkaitan tentang penelitian sebagai informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran Komisi Penanggulangan AIDS dalam menjalankan tupoksi sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Samarinda. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS agar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan berjalan dengan baik. Dengan demikian dari hasil tersebut diatas dapat disimpulkan tupoksi yang dilakukan Komisi Penanggulangan AIDS sudah berjalan dengan baik dan harus ditingkatkan lagi agar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilaksanakan dapat berjalan lebih baik lagi serta dapat menekan jumlah laju penularan HIV dan AIDS di Kota Samarinda.

Kata Kunci : Komisi Penanggulangan AIDS, HIV dan AIDS.

PENDAHULUAN

Undang-undang kesehatan di Indonesia diatur melalui Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini dibuat dan disahkan pada tahun 2009, sebagai wujud pengakuan negara atas hak asasi manusia di bidang kesehatan. Sesuai dengan amanat dalam Pancasila serta Undang-undang Dasar Republik Indonesia, mewujudkan masyarakat yang sehat dan kuat merupakan salah satu cita-cita negara ini.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: lindasaputri892@yahoo.co.id

Dalam Undang-undang kesehatan tersebut disebutkan mengenai arti penting kesehatan masyarakat bagi negara. Kesehatan masyarakat sangat dibutuhkan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara agar proses pembangunan bisa berjalan dengan baik.

Masyarakat yang sehat juga menjadi sebuah modal besar bagi terciptanya ketahanan nasional dan upaya peningkatan daya saing bangsa di berbagai bidang. Untuk itulah, setiap upaya pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan harus dilandasi dengan adanya wawasan kesehatan. Artinya, bahwa setiap strategi pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat. Karena, kesehatan masyarakat ini adalah tanggungjawab semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dibuat sebagai pengganti Undang-undang kesehatan sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992. Penggantian ini dilakukan karena segala sesuatu yang diatur dalam Undang-undang lama dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman. Dalam Undang-undang kesehatan yang baru tersebut, dijelaskan berbagai hal yang berhubungan dengan kesehatan. Khususnya terkait dengan masalah yang pada undang-undang kesehatan sebelumnya belum diatur dan dijelaskan. Dengan demikian, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tersebut bertujuan untuk melengkapi serta merevisi dan menyesuaikan berbagai masalah kesehatan dengan kondisi terbaru.

Dalam Undang-undang kesehatan tersebut dijelaskan, setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan kesehatan yang nyaman, bermutu serta mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam Undang-undang tersebut juga dijamin mengenai hak masyarakat untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Selain itu, setiap orang di Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi serta pendidikan mengenai kesehatan yang seimbang serta bertanggungjawab. Informasi ini termasuk pada kegiatan pelayanan bagi diri mereka, yang di dalamnya meliputi tindakan dan proses pengobatan. Baik yang sudah maupun akan didapatkan dari semua tenaga kesehatan.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Organisasi

Organisasi berasal dari kata *arganon* dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Pengertian organisasi telah banyak disampaikan para ahli, tetapi pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip, dan sebagai bahan perbandingan akan disampaikan beberapa pendapat sebagai berikut:

Menurut Siagian (2002:26), organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan atau sekelompok bawahan.

Gibson dalam Wahab (2005:5) berpendapat organisasi adalah unit yang dikoordinasikan dan berisi paling tidak dua orang atau lebih yang fungsinya adalah untuk mencapai tujuan bersama atau seperangkat tujuan bersama.

Robins dalam Wahab (1998:4) menjelaskan bahwa organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar yang berfungsi secara *relative* terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau seperangkat tujuan.

Dengan demikian organisasi merupakan sarana untuk melakukan kerjasama antara orang-orang dalam rangka mencapai tujuan bersama, dengan medayagunakan sumberdaya yang dimiliki.

Unsur-unsur Organisasi

Organisasi mempunyai unsur-unsur pendukung agar bisa berjalan dan terlaksana.

Menurut Hasibuan (2001 : 27) organisasi mempunyai unsur yakni :

1. Manusia (*human factor*), artinya organisasi baru ada jika ada unsur manusia yang bekerja sama, ada pemimpin dan ada yang dipimpin.
2. Tempat kedudukan, artinya organisasi ada, jika ada tempat kedudukannya.
3. Tujuan, artinya organisasi baru ada jika ada tujuan yang ingin dicapai.
4. Pekerjaan, artinya organisasi baru ada, jika ada pekerjaan yang akan dikerjakan serta adanya pembagian pekerjaan.
5. Struktur, artinya organisasi baru ada, jika ada hubungan dan kerjasama antara manusia yang satu dengan yang lainnya.
6. Teknologi, artinya organisasi baru ada, jika terdapat unsur teknis.
7. Lingkungan (*Environment External Social System*), artinya organisasi baru ada, jika ada lingkungan yang saling mempengaruhi misalnya ada sistem kerjasama sosial.

Jenis-jenis Organisasi

Menurut Hasibuan (2003:57) jenis-jenis organisasi terdapat beberapa jenis yakni:

1. Berdasarkan Proses Pembentukannya
 - a. Organisasi Formal
 - b. Organisasi Informal
2. Berdasarkan Kaitan Hubungannya dengan Pemerintah
 - a. Organisasi Resmi
 - b. Organisasi Tidak Resmi
3. Berdasarkan Skala (Ukuran) Besar-Kecilnya
 - a. Organisasi Besar
 - b. Organisasi Sedang (Menengah)
 - c. Organisasi Kecil.
4. Berdasarkan Tujuannya
 - a. Organisasi Sosial
 - b. Organisasi Perusahaan
5. Berdasarkan *Organization Chart*/ Bagan Organisasinya

Organization Chart (bagan organisasi adalah suatu bentuk diagramatis yang menunjukkan aspek-aspek penting suatu organisasi, meliputi fungsi-fungsi utama dan hubungannya masing-masing, saluran pengendalian, wewenang dan pendelegasian wewenang dari masing-masing karyawan yang disertai tugas.

6. Berdasarkan Tipe-tipe/bentuknya
 - a. Organisasi Lini
 - b. Organisasi Lini dan Staf
 - c. Organisasi Fungsional
 - d. Organisasi Lini, Staf dan Fungsional
 - e. Organisasi Komite

Dalam hal ini pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di kota Samarinda yang dilakukan oleh lembaga organisasi KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) yang berstatus sebagai organisasi formal yang bergerak dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan PP RI No.75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pengertian Peran

Sudarhono (1998:15) mengatakan bahwa “peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi perilaku apa yang mesti dilakukan seseorang, yang menduduki posisi suatu jabatan”. Thoha (2005:263) mengatakan bahwa “suatu peranan yang dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal”. Soekanto (1990:268) peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.

Aspek-aspek Peran

Hal lain yang menggambarkan peran, adalah Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2000:31), yang mengemukakan beberapa aspek-aspek peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa bilamana masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemeritahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang *reponsive* dan *responsible*.

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrus*) dan kerancuan (*biases*).

Penanggulangan HIV/AIDS

Sesuai dengan Peraturan Presiden No 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, penanggulangan HIV/AIDS merupakan upaya yang dilaksanakan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) untuk mencegah, menghadapi, dan mengatasi suatu keadaan yang mengancam kesehatan masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan akibat orang yang berperilaku seksual dengan berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan kondom, dan pengguna narkoba suntik yang menggunakan jarum suntik secara bersama-sama.

Dimana KPA melakukan pencegahan dan penanggulangan tersebut dengan mengadakan kebijaksanaan dan program yang bertanggungjawab untuk pencegahan dan penanggulangan masalah tersebut tanpa membahayakan hak privasi, sesuai dengan Undang-undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 6 tentang Wabah Penyakit Menular menyatakan Upaya Penanggulangan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memoerkecil angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain.

Pengertian HIV/AIDS

AIDS merupakan singkatan dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome*, yaitu suatu kumpulan gejala yang ditimbulkan oleh virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Virus tersebut dinamakan HIV atau *Human Immuno Deficiency Virus*. HIV menyerang sistem kekebalan tubuh (sel darah putih). Sistem kekebalan tubuh biasanya melindungi tubuh terhadap serangan dari penyakit-penyakit yang akan masuk.

Tetapi bila tubuh telah terinfeksi oleh HIV, secara otomatis kekebalan tubuh akan berkurang dan menurun sampai suatu saat tubuh tidak lagi mempunyai daya tahan terhadap penyakit. Bila menderita penyakit yang biasanya tidak berbahaya pun, misalnya influenza atau penyakit ringan lainnya akan susah sembuh dan membuat orang tersebut menderita atau bahkan meninggal (Stratanas Penanggulangan HIV/AIDS 2003-2007).

Cara Penularan HIV/AIDS

Virus HIV dapat diisolasi dari cairan semen, sekresi serviks/vagina, air mata, air seni dan air susu. Namun tidak berarti semua cairan tersebut dapat menyalurkan infeksi karena konsentrasi virus dalam cairan-cairan tersebut sangat bervariasi. Sampai saat ini hanya darah dan air mani/cairan semen dan sekresi serviks/vagina yang terbukti sebagai sumber penularan serta ASI yang dapat menularkan HIV dari ibu ke bayinya.

Karena itu HIV dapat tersebar melalui hubungan seks baik sesama jenis maupun heteroseksual, penggunaan jarum yang tercemar pada penyalahgunaan NAPZA, kecelakaan kerja pada sarana pelayanan kesehatan misalnya tertusuk jarum atau alat tajam yang tercemar, transfusi darah, donor organ, pemberian ASI dari ibu ke anak. Tidak ada petunjuk/bukti bahwa HIV dapat menular melalui kontak sosial, alat makan, toilet, kolam renang, udara ruangan, maupun oleh nyamuk/serangga.

Implikasi HIV/AIDS

Meluasnya HIV/AIDS tidak hanya berpengaruh terhadap bidang kesehatan tetapi juga mempengaruhi sosial ekonomi, sesuai dengan PP RI No 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga kelangsungan penanggulangan AIDS dan menghindari dampak yang lebih besar di bidang kesehatan, sosial, politik, dan ekonomi.

Bagi sektor kesehatan HIV/AIDS menambah beban sistem kesehatan yang selama ini telah berat. HIV/AIDS membuat penderitanya lebih rentan terhadap infeksi oportunistik. Perawatan terhadap penderita HIV/AIDS membutuhkan perhatian dan pelayanan khusus. Hal ini akan meningkatkan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan maupun sistem kesehatan publik, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat miskin.

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)

Komisi Penanggulangan AIDS atau biasa disingkat KPA adalah sebuah lembaga independen yang bertujuan untuk meningkatkan upaya Pencegahan dan Penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi. Komisi Penanggulangan AIDS dibentuk berdasarkan undang-undang kesehatan di Indonesia yang diatur melalui Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden RI No 75 tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV/AIDS di Daerah.

Kemudian Pemerintah Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, menerbitkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/ AIDS di Kota Samarinda. Inilah dasar hukum Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dibentuk yang menjadi landasan implementasi kebijakan dalam penanggulangan permasalahan HIV/AIDS di Kota Samarinda. Tugas-tugas pokok Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Samarinda, diantaranya :

1. Pelaksanaan pengamatan epidemiologi pada kelompok penduduk yang beresiko tinggi tertular dan menjadi penular/penyebarkan AIDS.
2. Pelaksanaan penyuluhan bahaya dan cara pencegahan AIDS bagi masyarakat.

3. Penyebarluasan informasi AIDS melalui media massa.
4. Pembentukan beberapa kelompok kerja penanggulangan HIV dan AIDS yang terdiri dari : Pokja Pemberdayaan Kelembagaan dan Kemitraan, Pokja Promosi dan Pencegahan, Pokja Terapi Rehabilitasi, Pokja *Monitoring* dan Evaluasi (Monev).

Pengertian Penyuluhan

Pengertian penyuluhan menurut Natawidjaja (1972 : 10) adalah hubungan timbal balik antara dua orang individu (penyuluh dan klien) dimana penyuluh berusaha untuk menolong klien supaya dapat lebih baik memahami dirinya dalam hubungan dengan masalah-masalah hidup yang dihadapi pada masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, sehingga ia dapat memecahkannya.

Prayitno dalam Sukardi (1995 : 81) mengatakan bahwa penyuluhan adalah pertemuan antara *klien* dan penyuluh yang berisi usaha yang laras, unik dan *human*, yang dilakukan dalam suasana keahlian dan yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku.

Adapun serangkaian kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam melaksanakan penyuluhan kesehatan menurut Prayitno dalam Sukardi (1995 : 83) meliputi :

1. Peningkatan komunikasi dan penyebarluasan informasi kesehatan.
2. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat.
3. Pembinaan dan pengembangan kemampuan edukatif petugas-petugas non kesehatan.
4. Pengelolaan program.

Dari batasan penyuluhan kesehatan tersebut beserta rangkaian kegiatannya dapat dilihat adanya unsur informasi dan motivasi di dalamnya. Unsur informasi tercermin dan kegiatan dalam peningkatan komunikasi dan penyebarluasan informasi kesehatan. Sedangkan unsur motivasi terlihat pada tujuan untuk menjadikan cara hidup sehat sebagai kebiasaan hidup sehari-hari masyarakat agar berperan serta dalam usaha-usaha kesehatan.

Program Penyuluhan KPA

Untuk mencapai peningkatan penanggulangan HIV/AIDS, pelaksanaan penyuluhan melalui Komisi Penanggulangan AIDS mengadakan program-program yang berupa antara lain :

1. *Behavior Change Communication* (BCC) atau Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) merupakan kegiatan penjangkauan/pendampingan untuk memberikan informasi dan pendidikan keterampilan tentang pencegahan HIV/AIDS serta promosi penerapan pola hidup sehat bagi populasi berisiko, dilakukan secara teratur dan dalam jangka waktu tertentu.
2. Program Pemakaian Kondom 100% (PPK 100%) adalah kegiatan yang memberikan penekanan pada pendidikan dan promosi pemakaian kondom sebagai upaya menekan meluasnya penularan infeksi menular seksual (IMS) termasuk HIV/AIDS, terutama di kalangan populasi yang memiliki banyak

pasangan seksual. Untuk itu PPK 100% akan dilaksanakan di pusat-pusat konsentrasi transaksi seksual dengan banyak pasangan.

3. Program IMS, layanan kesehatan IMS merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengobatan rutin masalah IMS bagi pekerja seks perempuan, pria, dan waria. Dilaksanakan di Puskesmas atau Puskesmas Pembantu atau Klinik swasta yang sudah ada di wilayah yang terdekat dengan konsentrasi sebaran populasi berisiko. Layanan kesehatan IMS memiliki fungsi kontrol terhadap penularan IMS agar penularan IMS pada sub populasi berisiko dapat dipersempit.

Dengan program-program tersebut kepada masyarakat, khususnya bagi pihak berisiko diharapkan dapat meminimalisir meningkatnya penderita HIV/AIDS. Sehingga peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam hal ini akan sangat menentukan yaitu dalam hal penyampaian pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan HIV/AIDS.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Sumber dan Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan atas dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini diharapkan dapat saling melengkapi satu sama lain untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui narasumber/informan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan peneliti.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber-sumber lain seperti, dokumen, laporan, buku-buku ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

Pemilihan informan didasarkan pada subyek yang memiliki informasi dalam permasalahan yang akan diteliti dan bersedia memberikan data. Adapun informan yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengelola Program *Monitoring* Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Samarinda.
2. Staf-staf Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Samarinda dan pihak-pihak LSM yang terlibat dalam kerjasama pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS serta salah satu PSK dari lokalisasi Solong.

Pemilihan narasumber dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*: yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang memberikan data secara maksimal.

Teknik Pengumpulan data

Usaha pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis guna mendukung dan memperkuat isi dalam laporan penelitian yang disajikan oleh penulis, yakni melalui tahap-tahap observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Huberman, dan Saldana (20014:31-33) bahwa dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan: (1) kondensasi data, (2) penyajian data, dan (3) penyimpulan/verifikasi.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Gambaran Umum KPA Kota Samarinda

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Samarinda adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan segala upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Samarinda. KPA Kabupaten/Kota dibentuk atas pertimbangan bahwa dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di daerah secara intensif, menyeluruh dan terpadu.

KPA Kota Samarinda mempunyai tugas merumuskan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan AIDS di Samarinda sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh KPA Nasional. KPA Kota Samarinda dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 054/HK-KS/2006 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Samarinda dan mulai menjalankan tugasnya pada tahun 2007.

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Samarinda berada di Jl. Arjuna No.07 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Samarinda Ulu. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Samarinda terbentuk dari kumpulan berbagai organisasi-organisasi, LSM, kelompok masyarakat, maupun individu-individu di Samarinda yang memiliki kepedulian terhadap masalah HIV/AIDS.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Samarinda adalah :

1. Umum

Mencegah dan mengurangi penularan HIV/AIDS, meningkatkan kualitas hidup ODHA, serta mengurangi dampak sosial, ekonomi pada individu keluarga dan masyarakat.

2. Khusus

- a. Penyebarluasan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan menciptakan suasana kondusif
- b. Menyiapkan dan meningkatkan pelayanan konseling, test dan Care, Support & Treatment (CST)
- c. Meningkatkan peran serta seluruh komponen masyarakat

- d. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan
- e. Meningkatkan koordinasi pemerintah/lembaga, dinas, dan pihak terkait
- f. Penguatan komunitas

Sasaran yang ingin dicapai Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Samarinda adalah :

1. Kelompok tertular (ODHA) perlu dukungan penanganan khusus
2. Kelompok resiko tinggi (populasi kunci) Pengguna Narkoba Suntik (Penasun), Wanita Penjaja Seks/Pekerja Seks Komersial (WPS/PSK) dan pelanggan, homoseksual, waria, narapidana memerlukan intervensi khusus
3. Kelompok rentan karena lingkungan kerja
4. Masyarakat umum

Pembahasan

Peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara diketahui strategi yang dilakukan KPA Kota Samarinda adalah meningkatkan dan memperluas cakupan perawatan, dukungan dan pengobatan, meningkatkan koordinasi antara pemangku kepentingan dan mobilisasi penggunaan sumber dana di semua tingkat. Sedangkan kebijakan KPA adalah pencegahan penularan HIV/AIDS melalui transmisi seksual, penguatan dan pengembangan layanan kesehatan serta koordinasi antar layanan. Selanjutnya program KPA yaitu program mitigasi dampak dengan kegiatan penyediaan kesempatan pendidikan, pelayanan kesehatan, gizi dan akses pada bantuan ekonomi.

Program pendidikan lingkungan yang kondusif dengan kegiatan pokok diantaranya penguatan kelembagaan dan manajemen. KPA Kota Samarinda melaksanakan strategi, kebijakan dan program tersebut mengacu pada Rencana Strategi dan Rencana Aksi Nasional.

Pelaksanaan Pengamatan Epidemiologi pada Kelompok Penduduk

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara diketahui berbagai fakta yang ada memperlihatkan gambaran yang memprihatinkan, yaitu laju penularan HIV yang cenderung terus meningkat pada subpopulasi yang diamati oleh KPA Kota Samarinda dan peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan dari waktu ke waktu. Upaya-upaya pencegahan penularan HIV sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk upaya pengobatan bagi para penderitanya. Berdasarkan hasil pengamatan yang diamati oleh KPA Kota Samarinda pada beberapa subpopulasi diperoleh gambaran bahwa tingkat penularan HIV menunjukkan kecenderungan meningkat di Kota Samarinda.

Tidak semua lelaki dan tidak semua orang yang tidak memiliki potensi penular dan ditularkan. Hal ini dikarenakan waktu dan tempat dimana proses penularan atau tertular itu berlangsung terjadi dengan berbagai cara penularan atau tertularnya orang tersebut. Keberhasilan pengamatan yang dilakukan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Samarinda sudah cukup efektif untuk mengidentifikasi penular/penyebarkan AIDS terbukti dengan ditemukannya

peningkatan penular/penyubar AIDS dari tahun ke tahun. KPA berkoordinasi bersama Dinas Kesehatan dalam melakukan pengamatan.

Pelaksanaan Penyuluhan tentang Bahaya dan Cara Pencegahan AIDS Bagi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara diketahui bahwa penyuluhan HIV/AIDS yang dilakukan KPA Kota Samarinda merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh KPA. Dalam hal ini bentuk penyuluhan HIV/AIDS yang dilakukan oleh KPA yakni melalui komunikasi, informasi dan edukasi. Dari tiga hal tersebut sangat memudahkan masyarakat untuk memahami dan menyadari akan bahayanya HIV/AIDS bagi masyarakat. Pelaksanaan penyuluhan tersebut tidak hanya dilakukan oleh KPA Kota Samarinda saja, akan tetapi penyuluhan juga dilakukan oleh LSM yang ada di Kota Samarinda salah satunya yayasan Lembaga Advokasi dan Rehabilitasi Sosial (LARAS), dan komunitas Persatuan Waria Samarinda (Perwarsa) juga turut mendukung pelaksanaan penyuluhan HIV/AIDS.

Penyuluhan yang dilakukan KPA Kota Samarinda belum mendapatkan hasil secara signifikan dalam jangka waktu yang pendek namun dengan upaya pencegahan yang semakin meluas diharapkan penularan baru dapat ditekan. Terkait dengan tingkat pengetahuan masyarakat tentang bahaya dan cara pencegahan HIV/AIDS, KPA Kota Samarinda belum melakukan survei tersebut.

Penyebarluasan Informasi AIDS Melalui Media Massa

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dapat diketahui bahwa penyebarluasan tentang HIV/AIDS yang dilakukan oleh KPA yakni KPA Kota Samarinda bekerjasama dengan media elektronik dan cetak. Bentuk dari penyebarluasan sebagai sarana KPA adalah televisi, radio, koran, stiker, *booklet*, *leaflet*.

Akan tetapi yang sangat berperan penting atau menonjol dalam memberikan informasi bagi masyarakat tentang HIV dan AIDS di wilayah Kota Samarinda adalah *booklet*, stiker, dan *leaflet* mengenai HIV/AIDS, karena dengan informasi yang disajikan melalui *booklet*, stiker dan *leaflet* tersebut sangat jelas dan sistematis dengan cara penularan dan penyebarluasan serta cara menanggulangnya. Bentuk informasi yang disebarluaskan ke masyarakat Kota Samarinda adalah info tentang upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, layanan *Voluntary Counseling & Testing* (VCT) dan *Care, Support & Treatment* (CST).

Media massa sangat berperan penting dalam menyebarkan informasi tentang bahaya dan cara penularan HIV/AIDS, dan dengan adanya media massa ini diharapkan agar dapat membantu pengetahuan masyarakat tentang HIV/AIDS di Kota Samarinda dan dengan adanya media massa ini juga mampu menekan tingkat penularan serta penyebarluasan HIV dan AIDS sebagai informasi bagi lingkungan masyarakat Kota Samarinda.

Pembentukan Kelompok Kerja Penanggulangan HIV dan AIDS

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dapat diketahui bahwa pembentukan kelompok kerja KPA dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS Kota Samarinda berdasar pada Keputusan Walikota No. 449-05/669/HK-KS/XI/2013 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS di Kota Samarinda. Kelompok kerja tersebut terdiri dari Pokja Pemberdayaan Kelembagaan dan Kemitraan (advokasi), Pokja Promosi dan Pencegahan, Pokja Terapi Rehabilitasi (medis dan sosial), Pokja *Monitoring* dan Evaluasi (Monev).

Terkait dalam kelompok kerja tersebut dapat diketahui bahwa segala kegiatan dan permasalahan yang spesifik dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS tidak dapat ditangani secara umum melainkan dibutuhkan pihak-pihak tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangann HIV/AIDS, untuk itu dibutuhkan kelompok-kelompok kerja penanggulangan HIV/AIDS seperti yang terlampir pada surat keputusan Walikota. Dalam hal ini yayasan Lembaga Advokasi dan Rehabilitasi Sosial (LARAS) dan Persatuan Waria Samarinda (Perwarsa) merupakan bagian dari kelompok kerja tersebut.

Kendala-kendala yang Dihadapi KPA

Dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi Komisi Penanggulangan AIDS Kota Samarinda. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Stigma dan diskriminasi
2. Terbatasnya sumber daya manusia
3. Terbatasnya pendanaan
4. Sangat luas dan beragamnya kelompok resiko tinggi serta belum maksimalnya peran instansi, dinas dan lembaga terkait

Dari kendala-kendala yang dihadapi KPA tersebut telah dilakukan upaya-upaya sesuai dengan kendala-kendala yang dihadapi agar kegiatan untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dapat terealisasikan sesuai dengan tugas dan fungsi KPA Kota Samarinda.

Penutup

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan peneliti pada bab sebelumnya, berikut kesimpulan tentang Peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Samarinda :

1. Peran KPA dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Samarinda dilihat dari pelaksanaan pengamatan epidemiologi pada kelompok beresiko tinggi tertular dan menjadi penular/penyebarkan AIDS telah dilakukan dengan terkonsentrasi pada WPS/PSK, Penasun, Waria, LSL, dan pelanggan PSK/WPS dan sudah melakukan identifikasi penular/penyebarkan HIV dengan cukup baik.
2. Peran KPA dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Samarinda dilihat dari pelaksanaan penyuluhan tentang bahaya dan cara pencegahan bagi masyarakat telah dilaksanakan dengan bekerjasama dengan

pihak-pihak terkait seperti petugas rumah sakit, LSM peduli AIDS, aktifis peduli AIDS dan masyarakat peduli AIDS. Penyuluhan yang dilakukan dengan bekerjasama pihak-pihak terkait tersebut secara jangka pendek belum menunjukkan hasil yang signifikan akan tetapi memberikan manfaat menambah pengetahuan bagi para PSK lokalisasi Solong.

3. Peran KPA dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Samarinda dilihat dari penyebaran informasi bekerjasama dengan media elektronik dan cetak. Media massa yang paling menonjol dalam memberikan informasi yang dilakukan KPA adalah *booklet*, *leaflet*, dan stiker. Respon masyarakat atas penyebarluasan informasi cukup positif ditunjukkan dengan adanya dukungan dari masyarakat dalam upaya penyebarluasan informasi yang dilakukan KPA dan kelompok peduli AIDS.
4. Peran KPA dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Samarinda dilihat dari pembentukan kelompok kerja penanggulangan HIV dan AIDS yakni dibentuk berdasar pada Surat Keputusan Walikota No. 449-05/669/HK-KS/XI/2013 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS di Kota Samarinda. Kelompok kerja yang terbentuk meliputi Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Kemitraan (Advokasi), Kelompok Kerja Promosi dan Pencegahan, Kelompok Kerja Terapi Rehabilitasi, dan Kelompok Kerja *Monitoring* dan Evaluasi. Yayasan LARAS dan Perwarsa merupakan beberapa pihak yang bekerjasama dengan KPA.
5. Peran KPA dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Samarinda dilihat dari kendala-kendala yang dihadapi meliputi stigma dan diskriminasi, terbatasnya sumber daya manusia, terbatasnya pendanaan, sangat luas dan beragamnya kelompok resiko tinggi HIV dan AIDS serta belum maksimalnya peran instansi, dinas, dan lembaga terkait.

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang peneliti kemukakan maka peneliti dapat mengemukakan beberapa saran yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan peran Komisi Penanggulangan AIDS dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Samarinda, beberapa saran tersebut antara lain :

1. Dalam meningkatkan pelaksanaan penyuluhan tentang bahaya dan cara pencegahan HIV dan AIDS, KPA Kota Samarinda harus selalu berperan aktif menjalin koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penyuluhan agar laju penularan HIV/AIDS di Kota Samarinda dapat ditekan.
2. Dengan belum dilakukannya survei mengenai pengaruh penyebarluasan informasi melalui media massa terhadap tingkat pengetahuan masyarakat, KPA Kota Samarinda perlu melakukan survei tersebut.
3. Pemerintah dan KPA Kota Samarinda perlu mengoptimalkan peran media massa, karena pengaruh media massa baik cetak maupun elektronik mampu membentuk karakter masyarakat. Penyebaran informasi tentang HIV/AIDS dapat diekspos lebih luas dan cepat bila dibandingkan dengan cara manual (*face to face*). Dan perlu selalu menayangkan iklan atau film mengenai HIV/AIDS bagi masyarakat umum. Sebab informasi mendalam tentang

Peran Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Samarinda (Linda Saputri)

penanggulangan HIV/AIDS akan sampai ke masyarakat lebih sempurna melalui media cetak dan elektronik karena masyarakat selalu menonton televisi dan membaca koran/tabloid.

4. Dengan terbatasnya sumber daya manusia pada KPA Kota Samarinda, Komisi Penanggulangan AIDS perlu meningkatkan jumlah sumber daya manusia agar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan dapat terealisasi dengan baik.
5. Pemerintah sangat perlu memperhatikan bahwa HIV/AIDS merupakan masalah bersama yang akan menimbulkan kerugian di bidang kesehatan, ekonomi maupun sosial, untuk itu perlu memberikan pendanaan yang rutin dan cukup kepada KPA Kota Samarinda untuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Samarinda seperti penyuluhan mengenai HIV/AIDS dan pemberdayaan bagi ODHA.

DAFTAR PUSTAKA

- Djauzi, S. & Djoerban. 2007. *HIV/AIDS di Indonesia*. Jakarta : Pusat Penerbitan Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI.
- Greenberg, Jerald & Baron. 2000. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Prentice Hall.
- Hasibuan, Malayu, S.P. 2001. *Manajemen : Dasar, Pengertian dan Masalah*, Cetakan ke-10, PT. Jakarta: Gunung Agung.
- Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif, Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Mulyana, Deddy. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muninjaya. 1998. *AIDS di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- _____, Gde. 1999. *AIDS Dikenal untuk Dihindari*. Jakarta : Arcan.
- Moleong, Lexy, J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 1991. *Metode Research*. Bandung : Jemmars
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Siagian, Sondang, P., 2002, *Peranan Staf dalam Management*. Jakarta : Gunung Agung.
- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. 1998. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sudarhono, Edy. 1994. *Teori Peran, Konsep, Deviasi, dan Implikasinya*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono, 2003. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung : CV. Alfabeta.
- _____, 2006. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Peran Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Samarinda (Linda Saputri)

- Susanto, A.B. dkk. 2006. *Strategi Organisasi*. Yogyakarta: Penerbit Asmara Books.
- Thoha, Miftah, 1992, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, CV. Jakarta: Rajawali.
- Wahab, Azis Abdul. 2008. *Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Sholihin Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan* (edisi kedua). Jakarta: Bumi Aksara.

Sumber Dokumen :

- Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Presiden RI Nomor 75 tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.

Situs Internet :

- Carter, Michael. 2007. "WHO/UNAIDS menyetujui tes HIV opt-out, (online), (http://gessang.org/index.php?option=com_content&task=view&id=88&itemid=102), diakses tanggal 21 Februari 2014.
- Massofa. 2007. " Sosialisasi dalam kehidupan masyarakat heterogen", (online), (<http://massofa.wordpress.com/?s=sosialisasi>), diakses tanggal 21 Februari 2014.
- Mustafa, Hasan. 2007. "Komunikasi yang baik dalam berinteraksi sosial", (online), (<http://www.pu.go.id/publik/ind/produk/glossary/>), diakses tanggal 21 Februari 2014.
- Nainggolan, Risky. 2007. "Samarinda tertinggi kasus HIV/AIDSnya di Kaltim", (online), (<http://www.bappeda.samarinda.go.id/listberita.php?p=43>), diakses tanggal 23 Februari 2014.